

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI WAJIB
BELAJAR 9 TAHUN SECARA GRATIS BAGI KAUM PROLETAR DI
DUSUN BORAH KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

Nila Wahyuningsih & Nikmatul Ma'rifah

Mahasiswa Jurusan IPS Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang

Abstract

Government policy regarding the 9-year compulsory education is a policy that made the government to improve the quality of resources in Indonesia. This policy on the designation for all levels of Indonesian society, but particularly aimed at the middle to lower economic (the proletariat), where communities are living in remote areas with medium-economic conditions. But they also deserve the same education that is listed in UUSPN No. 20 of 2003, chapters 5 and 6. According to researchers from the results of research on the effectiveness of government policies regarding the 9-year compulsory education free of charge to the proletariat at Hamlet Village Borah Wiyurejo Pujon district can be concluded that the policy can be effective, because according to the results of research interviews with informants that government policies regarding the compulsory 9 year for free is already running and is evidenced by payment of tuition fee waiver, building fees and cutting the price of the book. But also there are still costs in the collection by institutions such as the cost of making raport and costs to the national final exams. Many benefits are felt by Hamlet Borah with the policy of this government that waivers of school fees and many children who were not initially school because parents can not afford to be interested in school.

Advisor: Dr. H. Nur Ali, M.Pd

Key words: Effectiveness, Government policy for 9-year compulsory education, the Proletariat.

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu negara. Sumber daya alam akan dapat dikelola dengan baik ketika ada integritas positif dengan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional, artinya SDM yang dimiliki suatu negara akan memiliki nilai penting ketika didasari pada kompetensi yang cukup baik. Lebih lanjut dampak dari isu global ini akan mengarah pada proses pendidikan yang ada di Indonesia.

Di era globalisasi ini semua individu di tuntut untuk mempunyai pendidikan yang tinggi dan mempunyai skill dalam bidang tertentu agar dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Namun demikian, tidak bisa ditampik bahwa bagi sebagian besar bangsa Indonesia pendidikan adalah "barang mewah". Di atas pendidikan, bangsa ini masih pusing memikirkan kesulitan hidup, terutama ekonomi. Selain karena faktor ekonomi yang belum mencapai titik aman, sekolah juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi bagaimana mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat yang tinggi, sedangkan untuk memberikan makan saja masih kesulitan.

Padahal kemajuan peradaban suatu bangsa karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai produk pendidikan yang berkualitas, maka tidak ada pilihan bagi kita selain untuk terus memicu kesadaran masyarakat menyekolahkan anak-anaknya dan mendorong pemerintah untuk menyediakan lembaga pendidikan berkualitas.

Berdasarkan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pasal 2 ayat 3 tentang urusan pemerintah yang di bagi bersama antar tingkat dan atau susunan pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 adalah semua urusan pemerintah diluar urusan sebagai mana di maksud pada ayat 2. ayat 4 tentang urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri dari 31 bidang urusan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan, Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta dengan memperhatikan hasil supervisi / monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan berbagai pihak lainnya atas pelaksanaan program BOS ditingkat sekolah yang diakibatkan oleh belum optimalnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi telah menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 01/X/SEB/2010 - 420/4041/SJ tertanggal pada 7 Oktober 2010 yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati / Walikota se Indonesia.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri jauh hari sebelum tahun anggaran baru, maka diharapkan agar Pemerintah Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota agar dalam penyusunan APBD Tahun 2011 sudah mengalokasikan dana sesuai yang dibutuhkan dalam rangka mencukupi kekurangan biaya yang diperlukan sekolah dalam mengelola satuan pendidikan. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu bisa dituntaskan sesuai jadwal yang ditentukan secara nasional yaitu pada tahun 2011 ini.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia, pembangunan pendidikan pada masyarakat menengah atas lebih memadai atau layak di bandingkan masyarakat miskin. Kemudian didukung dengan fakta yang ada di lapangan, saat ini tidak ada sekolah yang benar-benar memberikan fasilitas gratis bagi setiap siswanya. Alasannya biaya yang ditarik tersebut untuk membeli buku, seragam dan lain-lain bahkan untuk pengambilan raport pun di kenakan biaya. Hal ini menyebabkan semakin kentalnya anggapan bagi kaum proletar bahwasanya pendidikan itu tidak begitu penting, karena mereka berfikir yang bisa menjadikan mereka kaya itu bukan pendidikan, tetapi kerena kerja keras dan keuletan mereka bekerja. Dengan adanya pandangan demikian maka pendidikan di kaum proletar tidak akan mengalami peningkatan dan ini akan mengakibatkan rendahnya kualitas SDM dan juga berakibat pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat – sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat (Koenjaraningrat, 1991).

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan di bagi menjadi dua yaitu:(1) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) yaitu di dusun Borah Kecamatan Pujon tentang efektifitas kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun secara gratis. (2) Data skunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi data primer yang berupa dokumen – dokumen pada dusun Borah kecamatan pujon dan bahan – bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

Data sekunder tersebut meliputi Data jumlah penduduk desa, Data jumlah penduduk miskin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan: (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dilakukan secara berulang – ulang sesuai dengan persoalan pendidikan yang di hadapi kaum proletar. Subyek penelitian ini adalah penduduk desa borah yang tergolong kalangan perekonomian rendah (kaum proletar).

Setelah data terkumpul dan di validasi kemudian data diolah sebagai berikut: (1) klasifikasi data, (2) penyaringan data, (3) analisis data. Analisis data dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data dan dilanjutkan setelah setelah pengumpulan data selesai (Spradly,1989; Bogdan dan Biklen,1985; Miles dan Huberman,1984). Aktifitas dalam analisis data, meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Teknik yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yang soheh meliputi: Uji kredibilitas, Pengujian transferability, Pengujian depenability (reliabilitas), Pengujian konfirmability.

C. Hasil Penelitian

1. Latar belakang objek penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di dusun borah desa wiyurejo kecamatan pujon, sebagai tempat peneliti untuk mendapatkan

data - data yang di perlukan dalam penelitian dan juga sebagai tempat sumber informasi untuk penelitian peneliti.

Alasan peneliti untuk meneliti di dusun borah desa wiyu rejo karena dusun tersebut terletak di daerah terpencil yang akses transportasinya sangat sulit selain itu penduduknya di dominasi oleh kaum proletar (kurang mampu) dan rata - rata memiliki pendidikan yang rendah, maka peneliti merasa tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang wajib belajar 9 tahun secara gratis yang di buat oleh pemerintah bagi rakyat indonesia terutama untuk penduduk kurang mampu (kaum proletar).

Dengan ini peneliti melakukan penelitian pada dusun borah desa wiyu rejo yang penduduknya di dominasi oleh masyarakat kurang mampu (kaum proletar). Karena itu peneliti ingin mengetahui apakah kebijakan wajib belajar sembilan tahun itu berdampak bagi kehidupan kaum proletar, sehingga peneliti mengambil judul yang bisa di jadikan Analisis Ilmiah, yaitu: "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Mengenai Wajib Belajar 9 Tahun Secara Gratis Bagi Kaum Proletar Di Dusun Borah Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon".

2. Hasil Penelitian

Penelitian ini di lakukan mulai tanggal 3 juli 2011 untuk meminta ijin kepada kepala desa wiyurejo yaitu dengan bapak Saikudin, untuk melakukan penelitian di dusun borah yang berada di bawah naungannya. Selain itu juga meminta gambaran tentang penduduk dan lokasi di dusun borah untuk meneliti hal yang berkaitan dengan " Efektivitas Kebijakan Pemerintah Mengenai Wajib Belajar 9 Tahun Secara Gratis Bagi Kaum Proletar Di Dusun Borah Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon". Seperti pernyataan dari bapak Saikudin selaku kepala desa Wiyurejo berikut: 1. " ndek borah iku ancen penduduk e kebanyakan wong gak duwe, terus seng nerosno sekolah ya arang, soale sekolahe iku adoh karo dalane angel.yo teros samean lek kate rono langsung nang pak RT , cek genah ndek kono ono data penduduk e". (di borah itu memang penduduknya kebanyakan orang yang tidak punya , kemudian yang melanjutkan sekolah masih

¹ Wawancara dengan kepala desa Wiyurejo Bapak Saikudin tanggal 3 Juli 2011

jarang, karena sekolahnya jauh dan jalannya sulit. Selanjutnya kamu kalau mau kesana langsung ke pak RT, biar jelas disana ada data penduduknya.)

Hal tersebut diperkuat dengan pengamatan yang dilakukan peneliti pada saat penelitian. Kejadian yang dialami peneliti pada saat peneliti hendak melakukan penelitian pada tanggal 10 Juli 2011, adapun pengamatan dan peristiwa yang dialami peneliti adalah sebagai berikut :²

Pada suatu ketika siang hari sekitar pukul 12:43, peneliti sengaja datang ke Dusun Borah untuk mengadakan penelitian dan menemui bapak Darmaji selaku ketua Rt Dusun Borah untuk meminta izin sekaligus meminta data penduduk Borah. Akan tetapi perjalanan peneliti menuju Dusun Borah terhambat karena saat itu di Desa Madiredo tepatnya Dusun Karas mengadakan pawai akbar yang melewati akses jalan menuju Dusun Borah sehingga jalan menuju Dusun Borah ditutup sampai selesainya pawai akbar. Sekitar pukul 17:31 pawai selesai dan peneliti melanjutkan perjalanan menuju Dusun Borah, karena saat itu sudah petang maka suasana disekitar jalan agak gelap dan tidak ada lampu penerangan menuju dusun Borah. Selain itu medan yang dilalui sangat sulit dengan jalan yang sedikit menanjak dan kondisi jalan yang rusak parah dengan dikelilingi oleh sungai dan hutan bambu.

Kondisi diatas sangat menggambarkan bahwa Dusun Borah kurang di perhatikan oleh pemerintah daerah. Seperti pernyataan dari Bapak Darmaji : 3 Ten Borah niki lak sumber penghasilane sakeng tiang wiyu, Pujon kale Karas, tapi ngrugiaken penduduk mriki, soale monter trek gede-gede niku medale mriki trus tiang beto sepeda niku kale bane dirante, ngoten niku lak ngrusak dalam ten mriki. Ten mriki ngusulaken nedi damelaken jomplangan tapi mboten angsal, soale ten deso bagean pun wonten jomplangan. Nedi dana lek mboten ten kecamatan langsung mboten kiro di paringi. (di Borah ini sumber penghasilan dari orang Wiyu, Pujon, Karas, tapi merugikan penduduk asli, soalnya mobil truk yang besar-besar itu lewat sini kemudian orang bawa sepeda itu rodanya dikasi rantai, yang seperti itu kan merusak jalan disini. Di sini mengusulkan minta dibuatkan jompatan tidak boleh, karena di desa bagean sudah ada jompatan. Minta dana kalau tidak di kecamatan langsung gak mungkin dikasi).

² Olahan data hasil penelitian, 10 Juli 2011

³ Wawancara peneliti dengan Bapak Darmaji pada tanggal 24 juli 2011

Nila Wahyuningsih & Nikmatul Ma'rifah - Efektivitas Kebijakan Wajib 9 Tahun

Karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, Dusun Borah menjadi salah satu Dusun tertinggal yang ada di Kecamatan Pujon. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pada tanggal 10 Juli 2011 Dusun Borah memiliki 51 kepala keluarga yang kebanyakan bekerja sebagai petani dengan 8 kepala keluarga yang memiliki anak yang saat ini menempuh pendidikan SMP/MTs.

Tanggapan Kaum Proletar Di Dusun Borah Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Mengenai Efektivitas Kebijakan Pemerintah Mengenai Wajib Belajar 9 Tahun Secara Gratis.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan pada tanggal 24 juli 2011 mengenai kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun dapat di ketahui sebagian besar dari warga borah mengerti tentang wajib belajar 9 tahun. Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari bapak Ah Buang sebagai berikut :4 “ ngeh ngertos, sak niki sekolah kudu sampek sangang tahun minimal SMP” (ya saya tahu, sekarang sekolah harus sampai sembilan tahun minimal SMP). Bapak Ah Buang juga mengatakan bahwa beliau mengetahui tentang wajib belajar sembilan tahun dari televisi dan saat rapat di sekolah.

Bapak Ruba'i juga menyatakan bahwa:5 “ kulo semerap wajib belajar sembilan tahun iku dugi lek wonten rapat – rapat sekolah, ngeh kados rapat mendet rapot nikulo, mbak” (saya tahu wajib belajar sembilan tahun itu dari rapat – rapat di sekolah, ya seperti rapat pengambilan rapot, itu mbak).

Sebagia besar warga dusun mborah mengerti dan mengetahui tentang kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar sembilan tahun secara gratis, dan warga dusun mborah juga merasakan bahwasannya kebijakan pemerintah tersebut sudah terlaksana, meskipun ada sebagian dari kebijakan pemerintah tersebut yang belum terlaksana dengan baik. Seperti pernyataan yang di sampaikan oleh ibu Jamil yang putrinya sekolah di MTS Mafatiul Huda, berikut pernyataan dari Ibu Jamil :6

Ten MTS niku uang gedung kale SPP niku mboten bayar tapi lek buku niku asline hargae Rp. 92.000 tapi namung dikengken bayar Rp.

⁴ Wawancara peneliti dengan Bapak Ah Buang pada tanggal 24 juli 2011

⁵ Wawancara peneliti dengan Bapak Ruba'i pada tanggal 24 juli 2011

⁶ Wawancara peneliti dengan Ibu Jamil pada tanggal 24 juli 2011

50.000 tirose dana sakeng pemerintah niku tasek kurang. Kados mendet rapot niku geh tasek bayar biasane geh Rp. 10.000.(di MTS uang gedung dan SPP sudah tidak bayar tapi untuk beli buku awalnya harga buku Rp. 92.000 tapi hanya disuruh bayar Rp. 50.000 katanya ana dari pemerintah masih kurang. Untuk mengambil rapot itu juga masih bayar biasanya Rp. 10.000)

Ibu Mistiamah juga mengatakan bahwa :⁷

Yugo kulo kaleh, seng setunggal namine Feri Andika sekolah ten SMK Kota Batu seng ragel niku namine Dina Novita Damayanti sekolah ten SMP Islam 2 Pujon, ten SMP niku uang gedung mboten bayar trus SPP niku tergantung kemampuan orang tua, nek yugo kulo sampun mboten Mbayar SPP. Tapi nek LKS niku tasek bayar Rp. 96.000 trus nek sampun kelas 3 niku kajenge ujian tasek bayar Rp. 500.000.(anak saya ada dua yang pertama namanya Feri Andika sekolah di SMK kota Batu yang terakhir namanya Dina Nivita Damayanti sekolah di SMP Islam 2 Pujon, disitu uang gedung sudah tidak bayar kemudian SPP tergantung kemampuan orang tuanya, kalau anak saya sudah tidak bayar SPP. Tetapi kalau LKS masih bayar Rp. 96.000 , kalau suah kelas 3 mau ikut ujian masih bayar Rp. 500.000)

Kaum Proletar Di Dusun Borah Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Merasakan Adanya Kebijakan Pemerintah Mengenai Wajib Belajar 9 Tahun Secara Gratis.

Dengan adanya kebijakan tersebut ada beberapa hal yang dirasakan oleh warga di Dusun Borah, seperti hasil wawancara dengan bapak Muslikin pada tanggal 28 Juli 2011 sebagai berikut :⁸ “ yugo kulo niku wonten enem, tapi liyane sampun omah-omah saiki kari siji sekolahe ndk MTS Bagean, iku sekolahe gak mbayar sragme iku dikei loro karo gurune bukune salonge dikei karo seng penting dikongkon fotocopi, wes alhamdulillah ngene iki nyekolahno arek gak bayar. Kulo ngeh matur nuwun kale pemerintah mergakne rakyat kayak kulo iki tasek diperhatekno”(anak saya itu ada enam. Tetapi lainnya sudah rumah tangga sendiri-sendiri tinggal satu sekolah di MTS bagean, sekolahnya itu tidak bayar seragam diberi oleh gurunya dua pasang, buku sebagian diberi

⁷Wawancara peneliti dengan Ibu Mistiamah pada tanggal 24 juli 2011

⁸ Wawancara peneliti dengan Bapak Muslikin pada tanggal 24 juli 2011

yang penting-penting disuruh fotocopy, alhamdulillah seperti ini menyekolahkan anak tidak bayar. Saya juga terima kasih kepada pemerintah karena rakyat seperti saya masih diperhatikan)

Pak darmaji selaku ketua RT di Dusun Borah juga menyatakan, sebagai berikut : 9“ Alhamdulillah wontene sekolah gratis niki ngeringanno kulo mboten bayar SPP, tapi namung bayar buku tok, ngeh kados seng diomongaken ibu mistiamah maeng, geh niku manfaate kanggo kulo ngringanno bayar sekolah yugo kulo salah sakniki yugo kulo kaleh niku sekolah kabeh” (alhamdulillah adanya sekolah gratis ini meringankan saya tidak bayar SPP, tetapi hanya buku saja, ya seperti yang dibicarakan oleh ibu mistiamah tadi, manfaatnya buat saya meringankan bayar sekolah anak saya, sekarang ini anak saya dua itu sekolah semua).

Tetapi tidak semua warga merasakan adanya kebijakan pemerintah tersebut, misalnya seperti Bapak Subari yang putrinya tidak melanjutkan pendidikan ke SMP yang awalnya sekolah di MI Bagean karena jarak ke sekolah jauh dan penghasilannya tidak cukup untuk membeli buku dan uang saku.¹⁰ Seperti pernyataan dari mirna wati putri dari Bapak Subari, sebagai berikut :¹¹ “ bukune niku kabehe limolas trus dua buku hargane limolas ewu” (bukunya itu semuanya lima belas kemudian dua buku harganya Rp. 15.000). bapak subari juga menuturkan sebagai berikut :¹² “ damel sangune lare niku loe mboten wonten,lawong sapi mawon kulo ngrumat gadane tiang” (untuk uang saku anaknya itu tidak ada, sapi saja saya memelihara punya orang).

Minat Kaum Proletar Di Dusun Borah Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Untuk Menyekolahkan Anak Dengan Adanya Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun Secara Gratis.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yakni wajib belajar 9 tahun secara gratis mendorong minat warga Dusun Borah untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari ibu Mistiamah sebagai berikut :¹³

⁹ Wawancara peneliti dengan Bapak Darmaji pada tanggal 24 juli 2011

¹⁰ Olahan data hasil penelitian, 24 Juli 2011

¹¹ Wawancara peneliti dengan Mirna Wati pada tanggal 24 juli 2011

¹² Wawancara peneliti dengan Bapak Subari pada tanggal 24 juli 2011

¹³ Wawancara peneliti dengan Ibu Mistamah pada tanggal 24 juli 2011

“ kulo ngeh minat mbak, soale nyekolahno yugo maleh ringan” (saya berminat mbak, karena menyekolahkan anak itu menjadi ringan. Hal ini juga dinyatakan oleh bapak Muslikin bahwa beliau sangat berminat menyekolahkan anaknya karena mendapatkan keringanan juga agar kehidupan anak bisa lebih baik dengan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ibu Jamil juga berpendapat demikian.

Akan tetapi ada juga warga yang tidak berminat menyekolahkan anaknya bukan karena masalah biaya tetapi untuk membantu mereka, seperti yang diungkapkan bapak Abdul Manap, berikut:¹⁴ “ yugo kulo tigo seng setunggal sampun omah - omah , kabeh sampun lulus MI tapi mboten wonten seng nerussaken SMP, soale kulo mboten wonten seng ngrencangi ngrumput. Lek kulo mboten keberatan masalah biaya, tapi nggeh niku mboten wonten seng ngrencangi ngrumput, opo meneh lek ketiga rumput iku uangel buk, sapi kulo mawon nikulo papat” (anak saya tiga yang satu sudah berumah tangga, semua sudah lulus MI tapi tidak ada yang melanjutkan ke SMP, karena saya tidak ada yang membantu mencari rumput. Kalau saya tidak keberatan masalah biaya, tapi yaitu tidak ada yang membantu mencari rumput, apalagi kalau musim kemarau rumput itu susah di cari buk, sapi saya itu saja empat).

D. Simpulan dan Saran

Menurut peneliti dari hasil penelitian tentang Efektivitas kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun secara gratis bagi kaum proletar di Dusun Borah Desa Wiyurejo kecamatan Pujon dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif, karena menurut hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun secara gratis tersebut sudah berjalan dan dibuktikan dengan pembebasan biaya pembayaran SPP, uang gedung dan pemotongan harga buku. Tetapi juga masih ada biaya yang di pungut oleh lembaga pendidikan seperti biaya pengambilan rapot dan biaya untuk ujian akhir nasional. Walaupun dengan adanya hal itu, warga Dusun Borah yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka tetap merasa ringan dalam menyekolahkan anaknya.

¹⁴ Wawancara peneliti dengan Bapak Abdul manap pada tanggal 24 juli 2011

Ada juga warga masyarakat yang tidak merasakan keefektivan kebijakan pemerintah ini karena tidak memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Bagi mereka pendidikan tidak penting dalam kehidupan, hal yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa menimbun harta untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Mereka beranggapan yang membuat mereka kaya bukan karena pendidikan melainkan karena kerja keras.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, bersama ini disarankan kepada:

Kepada pemerintah bahwasanya dalam membuat suatu kebijakan harus di tinjau dalam segi pelaksanaannya, misalnya dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara gratis ini, bagi masyarakat kalangan perkonomian menengah keatas tentang kebijakan ini sangat mudah di pahami karena mereka memahami akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka, tetapi pada masyarakat kalangan perekonomian menengah kebawah (kaum proletar) mereka belum sadar bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi masa depan anaknya, dan masyarakat golongan ini sebagian tidak bisa menikmati atau merasakan manfaat dari kebijakan tersebut karena tidak memahami betapa pentingnya pendidikan, dan seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan terlebih dahulu terhadap masyarakat golongan menengah ke bawah ini tentang pentingnya pendidikan bagi anaknya agar mereka mengetahui pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Walaupun mereka berada di dalam dusun terpencil mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama. hal ini tercantum dalam Undang - Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 dan pasal 6.

E. Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Sholichin. 2004. Analisis Kebijakan. Jakarta. Bumi Aksara.

Atmosoeparto, Kisdarto. 2003. Menuju SDM Berdaya-dengan kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.

- Nila Wahyuningsih & Nikmatul Ma'rifah - Efektivitas Kebijakan Wajar 9 Tahun
- Definisi Pendidikan ([Http://www.Shendublogspot.com](http://www.Shendublogspot.com) Diakses 1 April 2011 jam 12.54)
- Dimiyati & Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Reneka Cipta.
- <http://Tryusnita's.blogspot.com/2010/04/biaya> (Berbagai macam biaya) .html. Diakses 11 April 2011 jam 07.52
- Ialami, Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
- Imron, ali, 2002. Kebijakanaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara.
- Irsyadul Ibad Ila Sabilirrosyad, Darussaggraf. 1997. Surabaya: PP Alawy.
- Koenjaraningrat. 1991. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Mendiknas dan Mendagri terbitkan surat edaran bersama untuk optimalisasi peran pemerintah daerah (<http://www.lawangblogspot.com> diakses 2 April 2011).
- Majalah Tarbiyah no.36
- Mudyahardjo, Redja. 2006. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhibbin, Syah. 2005. Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. Bandung. Rusda Karya.
- M.Kasiram, EFA. Apa dan Bagaimana di Indonesia, Refleksi dalam majalah Tarbiyah no.43/XVI/Juli-September, tarbiyah-UIN press, malang.
- Noer Effendi, Tadjuddin. 1995. Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya
- Lexi J, Maloeong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Sugiono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Tap MPR No.11/MPR/1988 tentang GBHN, aneka ilmu, Semarang.1990.
- Tirtarahardja, Umar. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta:Pt Reneka Cipta.

- Nila Wahyuningsih & Nikmatul Ma'rifah - Efektivitas Kebijakan Wajar 9 Tahun
- Undang-Undang Dasar 1945, BP-7, Jakarta Pusat, 1993
- Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional, sinar Grafika, Jakarta:Grafindo
- Wahidmurni. 2008. Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Wahjoetomo. 1993. Wajib Belajar Sembilan Tahun; Problematika dan Alternatif Solusinya. Jakarta: Grafindo
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- PP No 38 2007 (<http://www.bapenas.co.id> diakses pada tanggal 4 Agustus 2011 jam 05.58).